

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Akhir Mata Ujian Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 11920/SK/BAN-PT/AK-PP/SX/2021, tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA : LISBRA DUMSARI BR SIHOTANG
NPM : 20550014
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Ujian Kongresional Sajian Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Hari Kamis, 04 April 2024 dinyatakan LULUS.

Panitia Ujian,

	Nama	tanda tangan
1. Ketua	: Dr. Nancy Nopelina, S.E., M.Si.	1. 
2. Sekretaris	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si.	2. 
3. Pengaji Utama	: Dr. T. Sihot Nababan, S.E., M.Si.	3. 
4. Anggota Pengaji	: Lastri, S.E., M.Si.	4. 
5. Pembela	: Des. Jusmer Sihotang, M.Si.	5. 

Dekan



(Dr. E. Hamonangan Siagalang, S.E., M.Si.)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya negara - negara berkembang membutuhkan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Hal ini mengakibatkan tabungan dalam negeri tidak memenuhi target pembangunan ekonomi sehingga tingkat pengembaliannya tidak memuaskan. Kebutuhan investasi harus selalu diimbangi dengan dana yang berasal dari dalam negeri. Namun, karena nilai mata uang domestik yang menurun dengan cepat, cadangan devisa menjadi alternatif yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi penurunan mata uang domestik. Pemanfaatan sumber daya asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi suatu bangsa yang tidak dapat diabaikan.

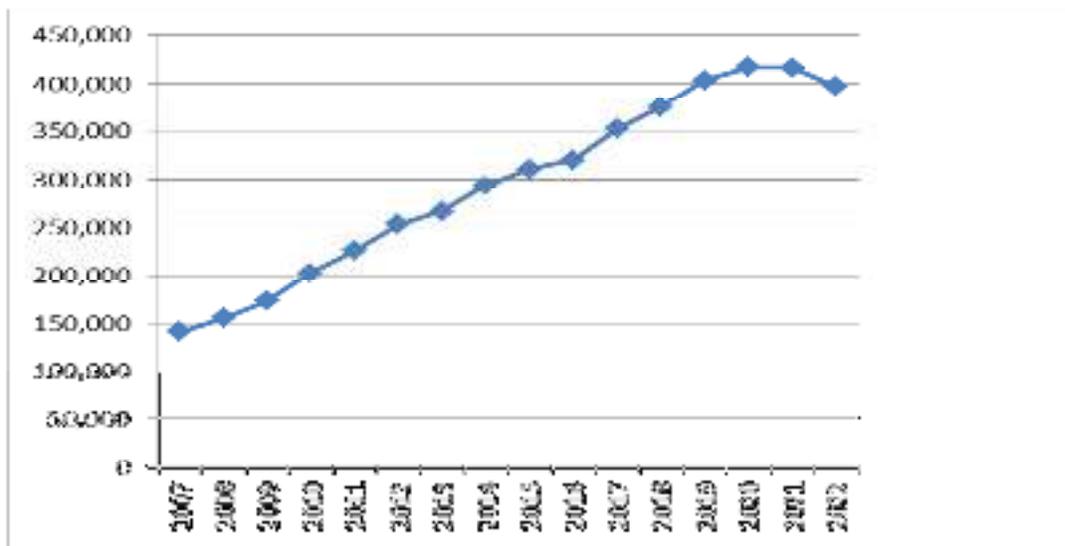
Safitri, (2020: 4) mengatakan bahwa :

Permasalahan utang luar negeri Indonesia selama ini tidak lepas dari strategi pembangunan yang dijalankan. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini fokus mengembangkan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian suatu negara memerlukan modal yang relatif besar. Alternatif mobilisasi modal dari luar negeri merupakan pilihan yang harus dilakukan Pemerintah untuk pembangunan ekonomi.

Sejak krisis moneter tahun 1998, banyak masalah ekonomi telah muncul, salah satunya utang luar negeri. Nilai utang Indonesia ke luar negeri saat ini telah menjadi satu masalah yang cukup serius bagi ekonomi karena kecenderungannya untuk meningkat setiap tahunnya. Karena pendapatan pemerintah masih lebih rendah dari pada pengeluarannya, pemerintah menggunakan utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran.

Dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara, terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi salah satunya kurangnya penerimaan yang di terima oleh pemerintah. Dalam melakukan pinjaman utang luar negeri, harus melibatkan penduduk dengan bukan penduduk dengan utang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang dari negara peminjam. Pada dasarnya negara yang tidak memiliki tabungan dalam negeri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maka akan menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber – sumber atau modal dari luar negeri. “Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman asing yang terikat pada perjanjian pinjaman dan tidak dalam bentuk surat berharga pemerintah, yang wajib di bayar berdasarkan syarat-syarat tertentu (Triyanto, 2018: 20)”. Adapun data perkembangan utang luar negeri Indonesia sebagai berikut:

Sumber :Bank Indonesia (BI) Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2022



Gambar 1.1 Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Juta (\$) Tahun 2007-2022

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat utang luar negeri Indonesia tahun 2007 sebesar 141,180 Juta US\$. Kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai 9,8% menjadi

155,080 Juta US\$ yang diakibatkan karena dampak masalah krisis subprime di Amerika Serikat dan kenaikan harga-harga yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global hal ini berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia. Utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 172,871 Juta US\$ sampai pada tahun 2017 mencapai sebesar 1,03% menjadi 352,469 Juta US\$. Peningkatan utang luar negeri disebabkan karena defisit APBN yang terus terjadi yang diikuti dengan kurangnya penerimaan negara dan rupiah menjadi terdepresiasi. Utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan Indonesia terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Semakin besar ketergantungan terhadap modal asing, semakin besar pula risiko terhadap sistem perekonomian global. Menipisnya APBN untuk membayar pokok dan bunga utang akan berdampak langsung pada berkurangnya proporsi anggaran yang digunakan untuk membiayai sektor lain yang dianggap kritis. Banyak pemangku kepentingan yang mengkhawatirkan situasi utang luar negeri Indonesia. Hal ini cukup beralasan mengingat statistik utang luar negeri Indonesia meningkat dan kekhawatiran mengenai kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga Indonesia semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang membutuhkan sumber daya yang relatif besar. Namun salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah kurangnya upaya mobilisasi dana untuk pembiayaan pembangunan. Besarnya lonjakan kenaikan utang luar negeri Indonesia dari tahun 2019 sampai ke 2020 disebabkan terjadi fenomena Pandemi COVID-19. Sebagaimana dikutip oleh Anggit (2019: 6) menyatakan bahwa ”penurunan Penanaman modal asing ini dialami seluruh negara di dunia, dan ia optimistis outflow ini sifatnya short term”. Situasi pandemi virus corona di awal tahun 2020 juga memperburuk situasi utang luar negeri Indonesia. ”Utang luar negeri Indonesia meningkat ke tingkat yang

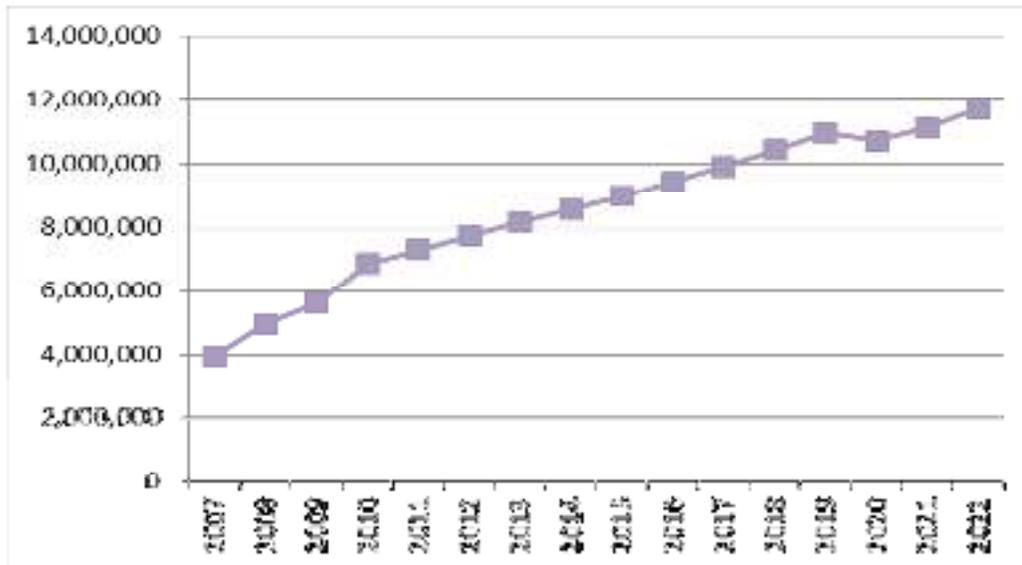
semakin tinggi karena peningkatan pendanaan untuk sektor layanan kesehatan dan kegiatan sosial. Subsidi dimanfaatkan pada sektor pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara” (Bank Indonesia, (2023: 1). “Dan pada tahun 2022 utang luar negeri Indonesia mengalami penurunan sebesar 396,84 Juta US\$”. Penurunan ini di sebabkan karena beberapa hal seperti penurunan utang luar negeri negara disebabkan oleh penurunan pinjaman yang mencakup pembayaran kembali pinjaman lebih banyak dibandingkan penarikan pinjaman untuk membantu membiayai program dan proyek prioritas.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu adalah data produk domestik bruto (PDB), baik pada harga berlaku maupun harga konstan. PDB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu, atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. PDB atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Sebaliknya, PDB berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tetap atau konstan.

Sukirno, (2016 :34-35) mengatakan bahwa:

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang – barang dan jasa – jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Dalam perekonomian di negara – negara maju maupun di negara – negara berkembang, produksi barang dan jasa bukan hanya di produksi di perusahaan milik penduduk negara tersebut akan tetapi oleh penduduk negara lain. Dalam produksi nasional selalu terdapat produksi yang diciptakan oleh faktor – faktor produksi yang berasal dari luar negeri.

Adapun data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Kosntan Tahun 2007-2022 dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, PDB Harga Konstan Menurut Penggunaan (Miliar Rupiah) Tahun 2022

Gambar 1.2 PDB Harga Konstan Tahun 2007-2022

Pada Gambar 1.2 diatas dapat dilihat pada tahun 2007 Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3.950.893 Miliar Rupiah. Kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan mencapai 0,25% hingga menjadi 4.951.356 Miliar Rupiah. PDB di Indonesia terus mengalami kenaikan yang berkelanjutan hingga pada tahun 2015 mencapai 0,31% Produk Domestik Bruto mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8.982.511 Miliar Rupiah dan datanya terus meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Bruto Indonesia berdasarkan harga kontan meningkat setiap tahunnya karena aktivitas perekonomian, khususnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Oleh karena itu PDB di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2022 dan mencapai 0,30% menjadi 11.710.397 Miliar Rupiah. Peningkatan PDB yang terus-menerus mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat di negara tersebut, dan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, tentu saja daya beli mereka juga meningkat. Namun, ketika pasokan barang dan jasa di pasar domestik lebih rendah dari permintaan, pemerintah mengimpor barang

seperti barang konsumsi dan bahan baku serta meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Secara umum, pengeluaran pemerintah diperkirakan akan mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu ukuran negara yang mengatur arah perekonomian dengan menentukan tingkat penerimaan dan pengeluaran negara setiap tahunnya (APBN) anggaran pendapatan dan belanja negara.

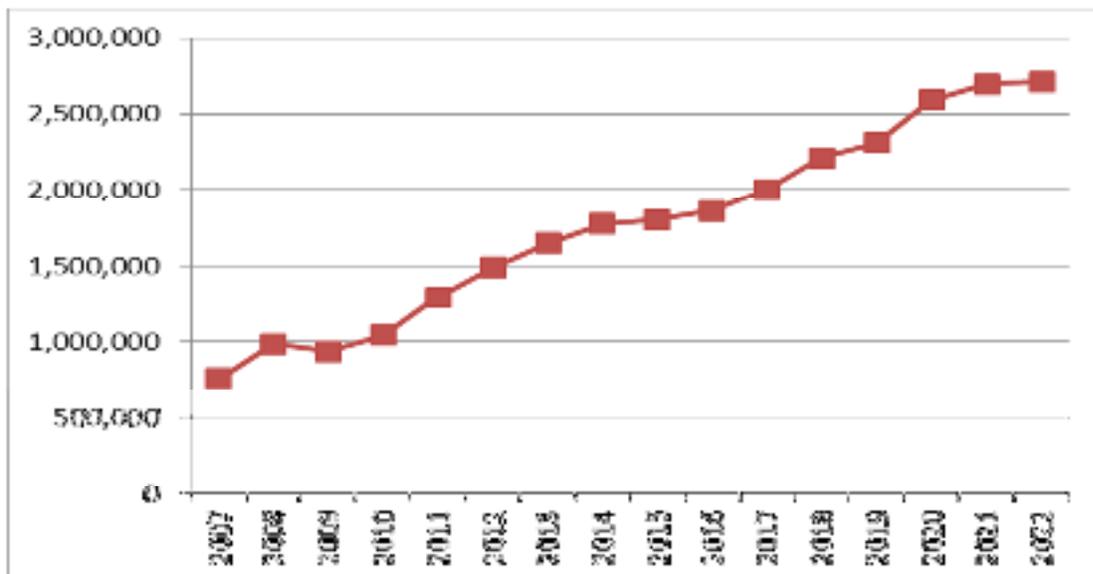
Menurut Ridwan dan Nawir (2021:68) :

Ketika suatu negara tidak mempunyai sumber daya keuangan yang cukup, maka negara tersebut harus mencari sumber daya lain di luar kemampuannya agar negara tersebut dapat terus melaksanakan pembangunannya. Karena suatu negara adalah sebuah unit tenaga kerja, hal ini mempunyai dampak yang luas terhadap seluruh negara.

Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan anggaran masuk dan pengeluaran suatu negara untuk dapat menciptakan perekonomian yang stabil dalam suatu negara yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun data perkembangan pengeluaran pemerintah dapat disajikan sebagai berikut:

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia. Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Miliar



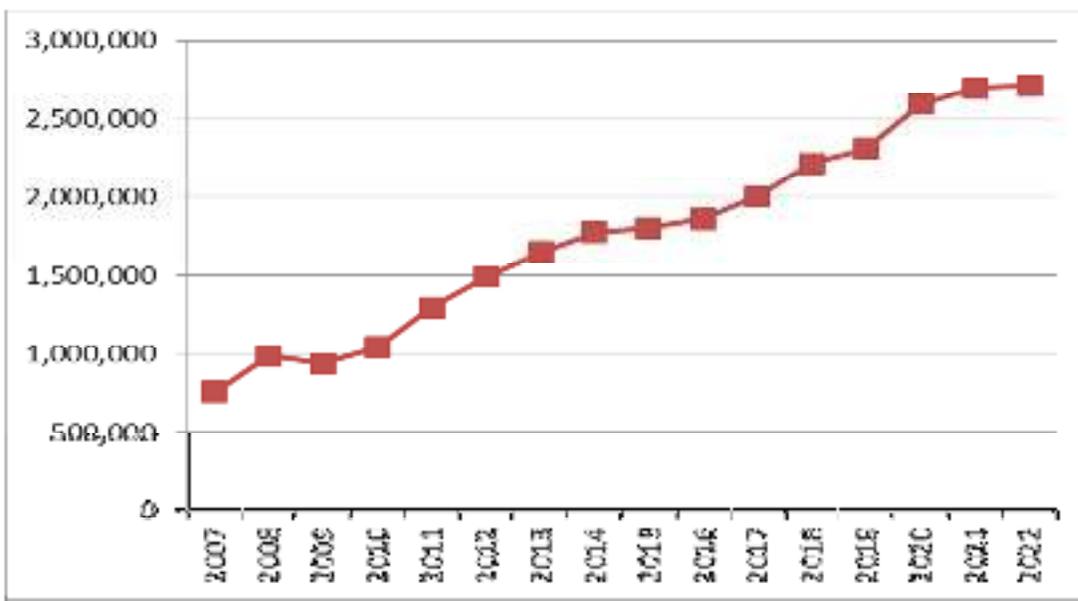
Rupiah)Tahun 2024

Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah dalam Miliar Rupiah Tahun 2007-2022

Pada Gambar 1.3 pengeluaran pemerintah dapat dilihat sebesar 757.650 Miliar Rupiah pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 0,30% menjadi sebesar 985.731 Miliar Rupiah. Namun pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,04% menjadi 937.382 Miliar Rupiah. Kemudian sejak tahun 2010 pengeluaran pemerintah kembali mengalami kenaikan mencapai 1.042.117 Miliar Rupiah dan kenaikan ini terus berlangsung hingga mencapai 1,60% menjadi sebesar 2.714.155 Miliar Rupiah pada tahun 2022.

Nilai tukar merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan nilai mata uang sebuah negara. Menurut Sihotang (2019: 3986) “Nilai tukar mata uang sangat penting dalam perdagangan antar negara, karena hampir sebagian besar negara di dunia terlibat dalam ekonomi pasar bebas. Semakin tinggi nilai tukar mata uang sebuah negara terhadap mata uang negara lain, semakin baik perekonomian negara tersebut”. Nilai tukar memungkinkan kita untuk menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam bahasa yang sama, nilai tukar mata uang ini sangat penting untuk keputusan pembelanjaan. Adapun data perkembangan nilai tukar Rupiah (USD) dapat di sajikan sebagai berikut:

Sumber : Bank Indonesia (BI) Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah Di Bank



Indonesia Tahun 2022

Gambar 1.4 Nilai Kurs (USD) Tahun 2007-2022

Gambar 1.4 dapat dilihat pada tahun 2007 -2022 Nilai Kurs Rupiah terhadap USD terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 Nilai Kurs (USD) sebesar 9.419 Rupiah. Kemudian pada tahun 2008 Nilai Kurs terdepresiasi mencapai 0,16% menjadi 10.950 Rupiah. (Cempakasari & Kutandi 2022:180) menyatakan “Kenaikan nilai tukar atau terdepresiasi nilai tukar Rupiah menyebabkan utang luar negeri Indonesia bertambah dikarenakan Indonesia melunasi utang negara dengan menggunakan valuta asing”. Selanjutnya pada tahun 2009 – 2010 nilai tukar terapresiasi dimana menguatnya nilai mata uang Rupiah terhadap USD. Terapresiasinya nilai tukar ini disebabkan karena dampak pemulihan ekonomi global yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai tukar Rupiah terus mengalami fluktuasi namun cenderung terdepresiasi hingga mencapai 0,59% pada tahun 2018 Nilai Kurs Rupiah menjadi sebesar 14.481 Rupiah. Nilai tukar rupiah cenderung menguat di tahun 2019 sebesar 0,04% dikarenakan adanya kenaikan supply uang beredar, maka nilai tukar rupiah alami perbaikan atau penguatan di tahun 2019 (*Sindow News. Com*, 2020) dan kembali terdepresiasi hingga pada tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar Rupiah Kurs Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2007 – 2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007 - 2022 ?

2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007 - 2022?
3. Bagaimanakah pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap utang luar negeri tahun 2007 - 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Produk Domestik Bruto terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007 - 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Nilai Tukar Rupiah terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis dalam meneliti.
2. Bagi pemerintah, membantu mengambil kebijakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terkait pada Produk Domestik Bruto, pengeluaran pemerintah, nilai tukar Rupiah terhadap khususnya penggunaan pinjaman utang luar negeri Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Utang Luar Negeri

2.1.1 Definisi Utang Luar Negeri

Mabyarti (2019:13) mengatakan bahwa “Utang luar negeri merupakan bagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari kreditor asing. Penerima obligasi luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Berutang pada dasarnya merupakan alternatif yang diambil karena berbagai alasan rasional”. Setiap negara yang melakukan pinjaman maupun memberi pinjaman kepada negara lain harus didasari kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga dalam proses pembayaran utang tidak terlepas dari perjanjian yang telah disepakati. Mahendra (2022:14) menjelaskan bahwa :

Berdasarkan sudut pandang pemberi pinjaman (kreditur), berfokus pada faktor-faktor yang memungkinkan pelunasan pinjaman tepat waktu dari sudut pandang pemberi pinjaman (kreditur). Sebaliknya peminjam (debitur) lebih fokus pada faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti nilai tambah, kemampuan membayar, dan kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan pembangunan dengan cara berutang bukan suatu kesalahan, namun yang menjadi permasalahan ketika utang tersebut tidak mampu dikelola atau penyalahgunaan yang menyebabkan utang dipergunakan secara tidak tepat sasaran. Fahmi (2021 : 105) mengatakan bahwa “ utang dijadikan sebagai solusi untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Ketika ketersediaan dana yang dimiliki oleh suatu negara tidak mencukupi dalam pembiayaan pembangunan, maka utang dianggap sebagai obat mujarab yang paling baik”.

2.1.2 Konsep Utang Luar Negeri

Sebagian utang negara berasal dari kreditor di negara lain. Kreditor asing ini dapat berupa pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau perusahaan swasta. Sebaliknya, bisa jadi

pemerintah, perusahaan swasta, lembaga swasta, atau individu yang membayar utang luar negeri. Utang dapat berupa uang yang dipinjam dari pemerintah asing, bank swasta, atau lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF.

Menurut (Setiawan, et al., 2022:3) menjelaskan bahwa utang luar negeri dapat dibagi menjadi tiga bagian menurut jenisnya, sebagai berikut:

1. Pembiayaan pembangunan resmi adalah pembiayaan publik bersyarat dan berbunga rendah yang diberikan kepada negara-negara berkembang, biasanya melalui kerja sama bilateral atau dengan dukungan organisasi internasional seperti IMF atau Bank Dunia.
2. Pembiayaan kredit ekspor melalui penyertaan dan penyertaan modal bentuk mata uang asing. Kredit ekspor untuk bantuan pembangunan biasanya ditujukan untuk meningkatkan ekspor oleh perusahaan negara atau swasta.
3. Pinjaman swasta adalah pinjaman atau obligasi dari bank swasta asing yang bersifat komersial. Berbagai bentuk kredit swasta ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor, namun dapat juga diberikan dalam bentuk obligasi dan surat berharga yang dibeli oleh asing.

Utang luar negeri ini dilunasi dengan cara yang sama seperti pinjaman. Jenis subsidi yang pertama adalah subsidi yang biasanya dilunasi secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan jenis kedua adalah pinjaman luar negeri (pinjaman), yang syaratnya biasanya lebih ketat dan lebih berhubungan dengan bisnis. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan dalam hibah yaitu "setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dan pemberi pinjaman luar

negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu”. Berdasarkan syarat pinjaman luar negeri Manopo (2007:44) juga menyatakan bahwa “Selama barang dan jasa dapat diakses oleh negara berkembang, utang luar negeri akan ditandatangani”.

2.1.3 Jenis-Jenis Pinjaman Luar Negeri

Jenis –jenis pinjaman luar negeri didasarkan pada bentuk pinjaman yang diterima, jangka waktu pinjaman, dan status penerima pinjaman. Menurut Lazuardy (2022:15) menjelaskan bahwa berdasarkan jenis pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi menjadi:

1. Bantuan proyek adalah bantuan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan yang berupa barang, jasa, dan modal.
2. Bantuan teknis mengacu pada pemberian bantuan oleh staf profesional.
3. Dana sistem adalah dana untuk keperluan umum yang penerimanya bebas memilih cara penggunaannya sesuai keinginannya.

Dilihat dari jangka waktunya pinjaman dibagi menjadi pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang. Menurut (Syaparuddin., Umiyati & Kusuma, 2015:208) mengatakan bahwa “pinjaman jangka pendek hutang dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang, pinjaman jangka menengah lebih dari lima tahun sampai lebih dari lima belas tahun, dan pinjaman jangka panjang lima belas tahun atau kurang, tergantung jangka waktu pinjaman”. Masa jabatannya lima belas tahun, melebihi tahun. Pinjaman dibagi menjadi pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta berdasarkan peminjamnya.

2.1.4 Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pembangunan Nasional

Setiap tindakan ekonomi mengandung berbagai konsekuensi, demikian juga tindakan pemerintah untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, jauh lebih baik dibandingkan mencetak lembar uang kertas baru untuk menutup defisit APBN, dan pemerintah dapat menutupnya dalam skala yang relatif besar tanpa efek samping. Kebijakan pembangunan dengan cara berutang bukan suatu kesalahan, namun yang menjadi permasalahan ketika utang tersebut tidak mampu dikelola atau penyalahgunaan yang menyebabkan utang dipergunakan secara tidak tepat sasaran. Fahmi (2021 : 105) mengatakan bahwa “Utang dijadikan sebagai solusi untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Ketika ketersediaan dana yang dimiliki oleh suatu negara tidak mencukupi dalam pembiayaan pembangunan, maka utang dianggap sebagai obat mujarab yang paling baik”.

Pembangunan dapat dilakukan dengan dukungan modal yang besar. Kenaikan tingkat harga umum yang signifikan (efek inflasi). Dengan cara ini, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan pendapatan nasional, sehingga memungkinkan pendapatan per kapita meningkat meskipun pertumbuhan penduduk terhenti.

Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan perekonomian bagi banyak negara debitur. Selain beban ekonomi yang harus ditanggung warga negara dalam membayar utangnya, ada juga beban politik dan psikologis yang harus diterima oleh negara-negara debitur karena ketergantungan mereka pada bantuan luar negeri.

Menurut Lazuardy (2022:2) menjelaskan bahwa:

Sejak krisis global pada awal tahun 1998, permasalahan utang luar negeri banyak terjadi di berbagai negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Meskipun negara-negara tersebut cenderung memiliki perekonomian yang membaik atau maju, mereka semakin terperosok dalam krisis utang luar negeri.

Meningkatnya pendapatan per kapita dan tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut tidak berarti bahwa negara-negara tersebut dapat digolongkan sebagai negara maju, dalam artian struktur perekonomiannya telah berubah menjadi struktur perekonomian industri. Oleh karena itu, meskipun pemerintah suatu negara secara teknis sempurna dalam upayanya mengelola utang luar negeri, kecuali jika keuangan negara tersebut benar-benar kuat, pencapaian tujuan pembangunannya akan sia-sia. Karena utang luar negeri selalu menyangkut kebutuhan devisa, maka pendapatan nasional hanya sebatas pembayaran langsung pokok pinjaman luar negeri dan bunga (pelunasan utang) kepada kreditor luar negeri dalam bentuk uang. Untuk pembayaran kembali bagi banyak negara debitur, cicilan utang dan pembayaran bunga merupakan pengeluaran mata uang asing yang paling penting.

Atmadja (2000:89-90) mengatakan bahwa :

Beban utang luar negeri dapat diukur salah satunya dengan melihat proporsi penerimaan devisa ekspor pada transaksi berjalan yang terserap oleh seluruh pembayaran pelunasan utang berupa pembayaran bunga dan angsuran. Selama negara kreditor (investor) meyakini telah terjadi perkembangan perekonomian yang baik di negara debitur, maka negara debitur diharapkan berhasil menyelesaikan pelunasannya.

2.2 Produk Domestic Bruto (PDB)

2.2.1 Definisi Produk Domestic Bruto (PDB)

Indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu adalah data produk domestik bruto (PDB), baik pada harga berlaku maupun harga konstan. PDB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi. Saptho (2013 : 195) mengatakan bahwa “PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional untuk barang dan jasa selama periode waktu tertentu”. PDB atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Sebaliknya, PDB berdasarkan harga tetap menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tetap atau konstan. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan dan struktur perekonomian, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Arif (2014:65) mengatakan bahwa:

PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi dalam batas suatu negara dalam setahun, atau sering kali merupakan penjumlahan dari nilai pasar seluruh jasa akhir yang diproduksi. Suatu negara atau masyarakat selama periode waktu tertentu (misalnya satu tahun). PDB menghitung produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan/perseorangan asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Karena barang yang diproduksi termasuk barang modal yang tidak diperhitungkan penyusutannya, maka besarnya yang ditentukan dari PDB dianggap bruto/kotor.

Produk domestik bruto memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana perekonomian dalam negaranya tumbuh. Negara juga dapat menganalisis dari data yang ada tentang faktor manakah yang dimaksimalkan dan mana yang harus di tingkatkan. Mankiw (2006:17) “Tujuan Gross Domestic Product (GDP) adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu”.

2.2.2 Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam suatu perekonomian terdapat salah satu teori pendapatan nasional yang ditunjukkan dalam statistika Indonesia yang merupakan PDB yang dihitung oleh Badan Pusat

Statistiks (BPS). Terdapat tiga pendekatan konseptual digunakan untuk menghitung produk domestik bruto : pendekatan produksi , pendekatan pengeluaran , dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam wilayah suatu negara selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut Bank Indonesia, Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) (2022 : 228- 229) menjelaskan bahwa unit-unit produksi dalam presentasi ini dikelompokkan menjadi tujuhbelas bidang atau sektor usaha: yaitu,

- a) Pertanian, perikanan dan kehutanan
- b) Pertambangan dan pengalihan
- c) Industri pengolahan
- d) Pengadaan listrik dan gas
- e) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
- f) Konstruksi
- g) Perdagangan besar dan eceran
- h) Transportasi dan pergudangan
- i) Penyediaan akomodasi dan makan minum
- j) Informasi dan komunikasi
- k) Jasa keuangan dan asuransi
- l) Real estate
- m) Jasa perusahaan

- n) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- o) Jasa pendidikan
- p) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- q) Jasa lainnya

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk domestik bruto merupakan seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) Produk Bruto Konsumsi Tetap Domestik Pembentukan Modal, (4) Perubahan Persediaan, (5) Ekspor Neto (setara dengan ekspor dikurangi impor). Menurut Mankiw (2006:25) merumuskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan :

Y: Produk Domestik Bruto (PDB)

C: Konsumsi

I: Investasi

G: Belanja negara

NX: Ekspor neto

3. Pendekatan Pendapatan

Arif (2014:67) mengatakan bahwa:

Produk domestik bruto adalah jumlah kompensasi yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi suatu negara selama jangka waktu tertentu (biasanya tahun). Upah yang dimaksud dalam adalah upah dan gaji, pensiun pokok, modal dan bunga keuntungan. Semua jumlah sebelum pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam

definisi ini, PDB juga mencakup depresiasi dan pajak tidak langsung bersih (pajak tidak langsung langsung dikurangi subsidi).

Produk domestik bruto (PDB) berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya PDB, negara dapat mengetahui sejauh mana perekonomian dalam negaranya tumbuh. Negara juga dapat menganalisis dari data yang ada tentang faktor manakah yang dapat dimaksimalkan dan mana yang harus di tingkatkan.

Kurniawan, Dompok & Tampubolon (2019:39) menjelaskan bahwa:

Fungsi PDB adalah sebagai berikut:

- 1) Produk domestik bruto (PDB) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produktif.
- 2) Produk domestik bruto (PDB) dihitung dengan menggunakan konsep sirkulus aliran.
- 3) Batasan rentang perhitungan PDB adalah negara (perekonomian dalam negeri).

Jenis Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain:

- 1) PDB riil/harga konstan, yaitu jumlah barang dan barang yang diproduksi dan dinilai oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) layanan.
- 2) Berdasarkan harga yang berlaku dalam periode tertentu. PDB nominal/harga berlaku, yaitu jumlah harga barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama suatu periode tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada saat penilaian dilakukan.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

2.3.1 Definisi Pengeluaran Pemerintah

Bawinti, Kawung & Lutungan (2018:24) berpendapat “Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Dalam suatu perekonomian, jika peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan ekonomi menurun, pemerintah

dapat merangsang pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah”.

Belanja pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam negeri guna memenuhi fungsi negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Eriyanti (2018:18) menyatakan “pemerintah secara terus-menerus memperbesar pengeluarannya dengan penerimaan pajak semakin besar”. Pasca pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan kekuasaan yang komprehensif, pragmatis dan bertanggung jawab yang berfokus pada pengaturan, alokasi, penggunaan sumber daya yang adil, transparan, pengelolaan keuangan yang efisien dan fungsional secara proporsional. Menurut Reza, et al (2023:10) “Keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam kerangka keseimbangan keuangan antara pemerintah federal dan negara bagian didasarkan pada desentralisasi, desentralisasi dan pengelolaan bersama”.

2.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Guritno (Bawinti, Kawung & Lutungan., 2018:25) “Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut”. Teori pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian: teori makro dan teori mikro.

1. Teori Makro

Mangkoesoebroto (2016:169-179) menjelaskan teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan; yaitu

- a) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
- b) Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
- c) Teori Peacock & Wiseman.

1) Model Pengembangan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (2016 : 170) menjelaskan bahwa pengembangan konsep-konsep yang berbeda dengan tahapan pembangunan ekonomi, yang dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi pemerintah mempunyai proporsi yang tinggi terhadap total investasi, karena pemerintah perlu menyediakan infrastruktur seperti infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Bahkan pada tahap pembangunan ekonomi menengah, pemerintah masih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat bertahan. Namun pada tahap ini, peran investasi swasta semakin meningkat. Bahkan pada tahap peralihan, peran pemerintah masih besar, karena meningkatnya peran sektor swasta menyebabkan banyak kegagalan pasar dan mengharuskan pemerintah menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar dan kualitas yang lebih baik. Terlebih lagi, tahap pembangunan ekonomi ini menyebabkan hubungan antar sektor menjadi semakin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh berkembangnya sektor industri yang terus meningkatkan tingkat pencemaran udara dan air, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatur dan mengurangi dampak negatif pencemaran tersebut terhadap masyarakat.

2) Hukum Wagner

Mangkoesobroto (2016:171) menjelaskan dalam bukunya bahwa Wagner menyadari bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian, hubungan antara industri dan industri, hubungan antara industri dan masyarakat, dan lain-lain menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menjelaskan mengapa peran pemerintah semakin meningkat terutama karena harus mengatur hubungan yang terjadi dalam masyarakat, pendidikan hukum, rekreasi, budaya, dan lain-lain..

Hukum wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_{kPP_1}}{PPK_1} < \frac{P_{kPP_2}}{PPK_2} < \dots < \frac{P_{kPP_n}}{PPK_n}$$

Dimana : P_{kPP} : Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP / jumlah penduduk

1, 2,.....n : Jangka waktu (Tahun)

1) Teori Peacock dan Wiseman

Menurut Mangkoesobroto (2016:173-174) dalam buku ekonomi publik menjelaskan bahwa Peacock dan Wiseman adalah dua pendukung teori tentang perkembangan belanja pemerintah yang optimal. Teori mereka didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah terus-menerus berusaha meningkatkan belanja, namun masyarakat enggan membayar pajak yang semakin tinggi untuk membiayai belanja pemerintah yang terus meningkat, oleh karena itu teori Wiseman dari Peacock dan Wiseman menjadi dasar teori seleksi. Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada teori bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak tertentu. Oleh karena itu, masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan pemerintah guna meningkatkan kemauan membayar pajak sampai batas tertentu. Tingkat

toleransi pajak ini menciptakan hambatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak secara semena –mena.

Sekalipun tarif pajak tetap sama, pembangunan ekonomi menyebabkan peningkatan pengumpulan pajak. Dan peningkatan penerimaan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, peningkatan GNP menyebabkan peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah.

2. Teori Mikro

Mangkoesoebroto (2016: 177) berpendapat bahwa “Perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab permintaan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan barang publik”. Banyaknya barang publik yang disediakan menyebabkan permintaan terhadap barang lainnya. Misalnya, pemerintah memutuskan untuk membangun bandara baru. Pelaksanaan pembangunan bandara akan meningkatkan permintaan barang-barang lain yang diproduksi oleh swasta, seperti semen, baja, dan peralatan transportasi.

2.4 Kurs

2.4.1 Definisi Kurs

Nilai kurs merupakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari, antara dua mata uang masing – masing negara atau wilayah. Nilai tukar atau sering disebut juga dengan nilai tukar mata uang asing. Harga dalam satuan mata uang asing dalam mata uang lokal.

Pratiwi (2012:18) berpendapat bahwa:

Nilai tukar atau exchange rate dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang dalam negeri yang dinilai dalam mata uang asing. Misalnya, dalam menyatakan kurs domestik sebesar (harga Rupiah) untuk nilai tukar mata uang asing Dolar

Amerika (USD) setara dengan 1 Rupiah (USD/IDR). Kurs dengan cara tidak langsung, kurs mata uang asing dinyatakan (harga USD) dalam mata uang domestik, yakni berapa Rupiah setara dengan satu Dollar Amerika (IDR/USD).

Dalam perekonomian suatu negara, penentuan sistem nilai tukar merupakan suatu hal yang penting karena hal tersebut merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian suatu negara dari perubahan perekonomian global. Perubahan naik dan turunnya nilai kurs bagi negara perlu di perhatikan sebagai salah satu strategi untuk menarik pemasuk modal asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Sukirno (2016:399) menjelaskan bahwa :

Negara dapat melakukan intervensi dalam menetapkan nilai tukar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai tukar saat ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. Nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh pasar bebas. Besarnya perbedaan ini, dan apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang ditetapkan oleh pasar bebas, bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai nilai tukar yang paling sesuai dengan tujuan pemerintah dalam stabilisasi dan pembangunan ekonomi.

Falianty (2019:275) mengatakan bahwa “Pada negara dengan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar secara resmi dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara yang secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut revaluasi, sedangkan kebijakan menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut devaluasi”.

Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut dengan nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah di sesuaikan dengan harga relatif, yaitu harga – harga di luar negeri. Nilai tukar riil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut

$$Q = S P/P^*$$

Keterangan :

Q : Nilai tukar rill

S : Nilai tukar nominal

P : Tingkat harga di dalam negeri

P* : Tingkat harga di luar negeri

Sukirno (2016: 402-403) menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi kurs: Permintaan dan perubahan permintaan, dan dengan demikian perubahan nilai tukar, disebabkan oleh beberapa faktor Seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Perubahan selera masyarakat

Selera masyarakat mempengaruhi pola konsumsinya. Perubahan selera masyarakat menyebabkan perubahan perilaku konsumsi terhadap produk produksi dalam negeri dan produk impor. Peningkatan kualitas produk dalam negeri dapat menurunkan margin impor, yang juga dapat meningkatkan ekspor.

2. Perubahan harga baran ekspor dan impor

Perubahan ini juga mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang asing, yang merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Produk dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif rendah meningkatkan ekspor, dan ketika harga naik, ekspor menurun. Jika harga barang impor turun maka jumlah barang yang diimpor akan bertambah, sebaliknya jika harga barang impor naik maka jumlah barang yang diimpor akan berkurang.

3. Kenaikan harga-harga umum (inflasi)

Inflasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap nilai tukar. Inflasi umumnya cenderung menurunkan nilai mata uang asing. Tren ini terjadi karena dampak inflasi, seperti Inflasi cenderung meningkatkan impor karena menyebabkan harga di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan harga di luar negeri..

4. Perubahan suku bunga dan pengembalian modal

Perubahan suku bunga dan pengembalian modal suku bunga dan pengembalian modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi arus modal. Rendahnya suku bunga dan hasil investasi cenderung mendorong aliran modal dalam negeri ke luar negeri. Di sisi lain, tingginya suku bunga dan hasil investasi akan mendorong masuknya modal asing ke dalam negeri.

2.4.2 Sistem Kurs

Falianty (2019:277-278) menjelaskan bahwa sistem kurs yaitu

1. The Impossible Trinity (Trilemma Kebijakan)

Merupakan suatu keadaan dimana negara menganut sistem

the imposible trinity dalam menjaga dan menentukan sistem nilai tukarnya dengan menyerahkan salah satu dari tujuannya yaitu:

- a. Stabilitas nilai tukar (oleh hard peg),
- b. Kemerdekaan moneter,
- c. Integrasi pasar keuangan (tidak adanya kontrol modal)

2. Fixed Exchange Rates (Nilai Tukar Tetap)

Merupakan negara yang menganut sistem nilai tukar tetap. Dimana negara mempertahankan nilai suatu mata uang pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar maka pemerintah turut serta untuk mengembalikannya. Negara-negara yang menganut sistem nilai tukar tetap akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- 1). Adanya nilai nominal (pegangan) yang jelas bagi kebijakan moneter.
- 2). Mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar dalam perdagangan dan investasi internasional.

Fahmi (2021: 69) menyatakan bahwa “ Penerapan nilai tukar dengan sistem *fixed exchange rate* mengharuskan negara yang bersangkutan memiliki kecukupan dana yang mencukupi atau jumlah *reserve* yang benar – benar memadai”. Di negara-negara dengan nilai tukar tetap, kondisi sempurna bagi pergerakan modal tidak dapat ditemukan karena kebijakan moneter tidak dapat merangsang produksi (sementara kebijakan fiskal sangat efektif dalam merangsang produksi). Kondisi yang tidak menguntungkan cenderung menurunkan aktivitas perekonomian dan suku bunga sehingga menimbulkan tekanan devaluasi. Bank sentral harus menjual cadangan uang dan mengurangi jumlah uang beredar, sehingga semakin memperburuk penurunan output.

3). Flexible Exchange Rates

Merupakan nilai tukar dengan paritas tetap terhadap satu atau lebih mata uang dengan revaluasi yang sering. Revaluasi adalah kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing. Suatu negara yang menganut sistem nilai tukar Flexible Exchange Rates akan memperoleh keuntungan, yaitu:

- a. Independensi kebijakan moneter (kebijakan diskresioner).
- b. Penyesuaian otomatis ketika terjadi guncangan pada perdagangan.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Hubungan Produk Domestik Bruto dengan Utang Luar Negeri

Berdasarkan teori utang menurut Tambunan (2008:253) “Tingkat utang luar negeri suatu negara ditentukan oleh tingkat optimalisasi penggunaan dana yang ada oleh warga negaranya, peluang yang ada untuk meminjam uang di pasar internasional, serta pilihan konsumsi dan investasi”. Utang luar negeri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya pinjaman dari luar negeri, penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk membangun sektor yang menunjang meningkatnya PDB di Indonesia. Peningkatan pendapatan PDB ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran utang luar negeri Indonesia dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan (PDB) akan membantu pemerintah dalam mengurangi pinjaman utang luar negeri Indonesia. Sebagaimana menurut (Santo dalam Bilatula, et al., 2023:1) mengatakan “utang luar negeri mengurangi insentif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan domestik, yang menyebabkan anggaran negara kekurangan dana pemerintah, yang sering sekali di tutupi dengan utang luar negeri”.

2.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Utang Luar Negeri

Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. (Eriyanti 2018: 68) menyatakan bahwa “Semakin banyak belanja pemerintah meningkat, maka semakin besar pula defisit anggaran, jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan”. Peningkatan utang luar negeri menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran utang. Semakin besar defisit

anggaran, maka semakin banyak utang yang di butuhkan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran baik dalam negeri maupun luar negeri. (Mangkoesebroto 2016:173). Menjelaskan dalam bukunya Peacock dan wiseman berpendapat bahwa “pemerintah selalu meningkatkan pengeluarannya namun dalam penerimaannya pemerintah mengandalkan masyarakat untuk membayar pajak. Perlu kita ketahui dalam pembayaran pajak masih banyak masyarakat yang kurang setuju jika pajak yang dikenakan terlalu besar”. Jika pungutan pajak terlalu besar maka dana swasta untuk investasi dan modal kerja berkurang. Untuk mengatasi gangguan tidak cukup dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah mungkin harus meminjam dana dari luar negeri. Peningkatan utang luar negeri juga jika terjadi terus menerus dan tidak adanya perlunasan utang dapat merusak perekonomian di Indonesia.

2.5.3 Hubungan Kurs dengan Utang Luar Negeri

Apriani, (2022:41) mengatakan “ nilai tukar mata uang sangat penting bagi negara-negara yang ingin mencapai pembangunan ekonomi, karena berkaitan langsung dengan bidang perdagangan luar negeri, investasi, bahkan utang luar negeri yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan”. Terdepresiasi nilai tukar rupiah atau meningkatnya USD akan menyebabkan naiknya utang luar negeri Indonesia. Ketika terjadi kenaikan USD (rupiah terdepresiasi) dimana negara melakukan pinjaman maka utang luar negeri juga mengalami peningkatan dikarenakan Indonesia membayar utang luar negeri dalam valuta asing . Afandi, (2022:522) mengatakan bahwa “Jika terjadi perubahan nilai tukar setiap tahunnya maka negara akan mengalami pengaruh dan dampaknya. Salah satunya adalah utang luar negeri yang merupakan sumber dana pembangunan”.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menginformasikan pemikiran penulis dan berfungsi sebagai faktor penting dalam pengembangan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

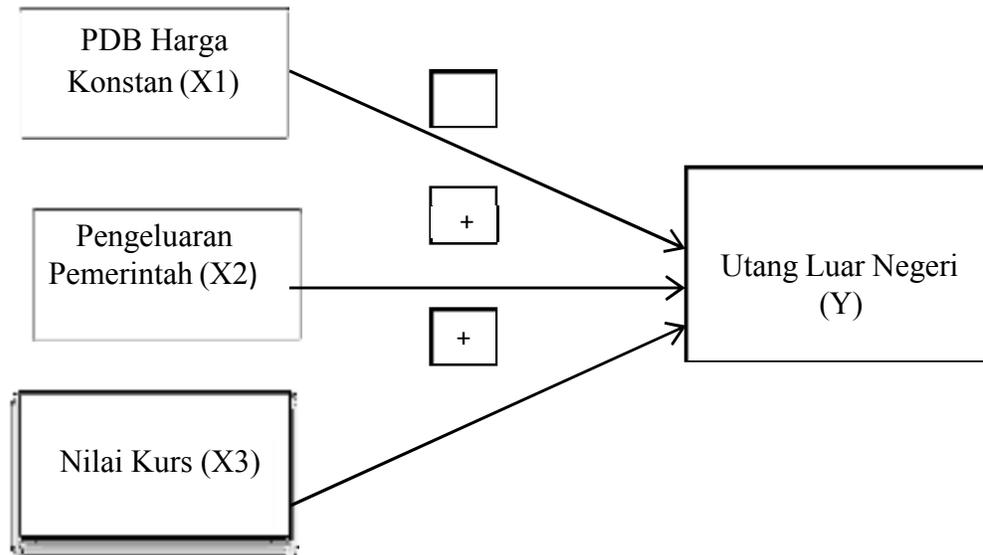
Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Devi (2014:6)	Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia	Analisis Linier Berganda	PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri di Indonesia. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Defisit anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.
2.	Pratama, Masnila, & Hartaty (2023:8)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia (Periode 2004-2021).	Analisis Linier Berganda.	Secara parsial pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang negatif pada utang luar negeri pemerintah Republik Indonesia selama tahun 2004-2021. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan parsial, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh negatif serta tidak signifikan pada utang luar negeri.
3.	Boer (2021:64)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan Suku Bunga Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia.	penelitian data time series (bulanan) dengan menggunakan metode analisis data yakni model Error Correction	Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah Indonesia periode 2014-2019 dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar

			Model (ECM).	negeri pemerintah Indonesia periode januari 2014-desember 2019 dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah Indonesia periode 2014-desember 2019 dalam jangka panjang, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah Indonesia periode januari 2014-2019 dalam jangkapendek.
4.	Melati (2020:85)	Analisis Pengaruh PDB, Cadangan Devisa, Nilai Tukar Dan Impor Terhadap UtangLuar Negeri Di Indonesia Tahun 1981-2018.	Analisis Autoregressi ve Distributed Lag (ARDL)	PDB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Cadangan Devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilaitukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Import berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh PDB harga konstan, pengeluaran pemerintah, dan nilai kurs (USD) terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007 – 2022. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya pendugaan dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PDB harga konstan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007-2022.
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007-2022.
3. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia tahun 2007-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri yaitu produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah dan nilai tukar Rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2007-2022 yaitu dalam bentuk angka runtut waktu (Time Series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS), Bank Indonesia (BI), Kemenkeu RI (Kementrian Keuangan Republik Indonesia) dan Satu Data Perdagangan. Data yang dikumpulkan adalah meliputi data produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, nilai tukar R upiah, dan utang luar negeri Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data-data serta menggabungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Penggunaan Model Ekonometrik

Metode analisis dan yang digunakan dimulai dengan pembentukan model sistematis, yaitu suatu pernyataan yang berhubungan yang berlaku di antara nilai PDB, pengeluaran pemerintah, nilai kurs terhadap utang luar negeri Indonesia. Data dalam penelitian ini dianalisis

dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan Eviews 9.0. Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Dimana:

Y : Utang luar negeri Indonesia (Miliar Rupiah)

$\hat{\beta}_0$: Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$: Koefisien Regresi

X_1 : PDB harga konstan (Miliar Rupiah)

X_2 : Pengeluaran pemerintah (Miliar Rupiah)

X_3 : Nilai kurs (Rupiah / USD)

ε_i : Galat (Error term)

3.5 Uji Kebaikan Suai (R^2)

Uji kebaikan suai (R^2) bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antar variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai, model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keberagaman variabel – variabel tak bebas yang dijelaskan oleh keberagaman variabel – variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$: R^2 . Artinya dari 1 adalah semakin nilainya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi dikarenakan mampu menjelaskan data aktual.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Secara Individu (Uji t)

Untuk mengetahui apakah variabel - variabel bebas (PDB, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar Rupiah secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Utang Luar Negeri). Maka dilakukan pengujian uji t pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ (0.05).

1. PDB Harga Konstan (X1)

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$, artinya PDB Harga Konstan tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_1 < 0$, artinya ada pengaruh negatif dan signifikan PDB harga konstan terhadap utang luar negeri Indonesia.

Rumus untuk mencari t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

dimana :

$\hat{\beta}_1$: Koefisien regresi

β_1 : Parameter

$S(\hat{\beta}_1)$: Simpangan Baku

Apabila nilai probability $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. artinya PDB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Kemudian jika nilai probability $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. artinya PDB secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

2. Pengeluaran Pemerintah (X2)

$H_0 : \hat{\beta}_2 = 0$, artinya pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_2 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri Indonesia. Rumus untuk mencari t hitung adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

dimana :

$\hat{\beta}_2$: Koefisien regresi

β_2 : Parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: Simpangan Baku

Apabila nilai probability $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Kemudian jika probability $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

3. Nilai Kurs (X3)

$H_0 : = 0$, artinya nilai kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_3 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara nilai tukar Rupiah terhadap utang luar negeri Indonesia. Rumus untuk mencari t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

dimana :

$\hat{\beta}_3$: Koefisien regresi

β_3 : Parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: Simpangan Baku

Apabila nilai probability $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Apabila nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya nilai kurs secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Kemudian jika nilai probability $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya nilai tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia.

3.6.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji- F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel- variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel terikat. Adapun langkah-langkah pengujian uji – F sebagai berikut:

a. Menurut hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

1. H_0 : $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = 0$ berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu utang luar negeri Indonesia.

2. H_1 : $\hat{\beta}_1$ tidak semua nol, $i = 1,2,3$ berarti variabel bebas secara serentak atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu utang luar negeri Indonesia.

b. Mencari nilai F hitung adalah nilai kritis F statistik dari tabel.

Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n- k). Rumus untuk mencari Fhitung adalah :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{JKR (k-1)}{JKG (n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu :

1. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,5$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Widarjono (2013:104) “multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi”. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel bebas (independen). Variabel bebas seharusnya tidak mempunyai hubungan antar variabel bebas lainnya dalam model regresi yang layak. Untuk mendeteksinya, dapat dilakukan dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors). Jika nilai VIF < 10 maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas.

3.7.2 Autokorelasi

Ghozali (2013:107) mengatakan “autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, disturbance error) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi”. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji D-W) dan uji Run (*Runs Test*).

1. Uji Durbin Watson (Uji D-W)

Ghozali (2013:108) mengatakan “uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen”. Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan Du

dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . secara umum dapat diambil patokan :

$0 < d < d_L$: Menolak hipotesis 0 (ada Autokorelasi Positif)

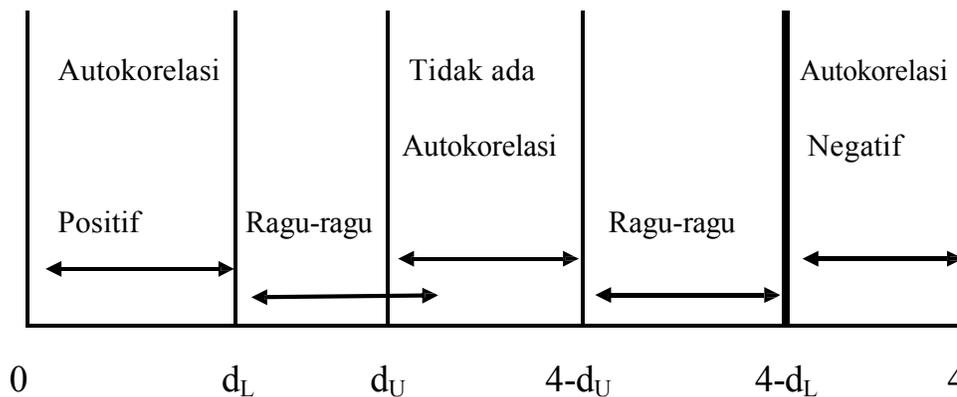
$0 \leq d \leq d_U$: Daerah keragu-raguan (Tidak ada keputusan)

$d_U < d < 4-d_L$: Gagal menolak hipotesis 0 (Tidak ada autokorelasi)

$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$: Daerah keragu-raguan (Tidak Ada Keputusan)

$4-d_L < d < 4$: Menolak Hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif)

$4-d_L < d < 4$: Menolak hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif).



2. Uji Run (Run Test)

Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Apabila nilai sig melebihi 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi.

Ghozali (2013 : 116) menyatakan bahwa:

Uji Run bagian dari statistik no-parametrik yang dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual

tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Uji Run digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Cara yang digunakan dalam Uji Run adalah sebagai berikut:

H_0 : Galat (res_ 1) acak (random)

H_1 : Galat (res_ 1) tidak acak

3.7.3 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi residual terdistribusi normal, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik, analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan anatar data observasi dengan distrinusi yang mendekati distribusi normal. Dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal merupakan metode yang tepat. Dasar pengambilan keputusan, sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8 Definisi Operasional

1. Utang Luar Negeri (Y)

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri merupakan Sebagian dari total utang negeri yang diperoleh dari para kreditor di luar negara. Dalam penelitian ini utang luar negeri yang digunakan adalah utang luar negeri Indonesia berdasarkan kelompok pinjaman yang diukur dengan satuan Juta US\$ dari tahun 2007-2022.

2. Produk Domestik Bruto (X1)

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. PDB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB berdasarkan harga konstan dengan satuan Miliar Rupiah dari tahun 2007-2022.

3. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh total pengeluaran negara dimana pemerintah mengatur perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen APBN. Data yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah tahun 2007-2022 dengan satuan Miliar Rupiah.

4. Nilai Tukar Rupiah (X3)

Kurs merupakan perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar dengan satuan Rupiah/USD dari tahun 2007-2022.

